

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik adalah hubungan legal yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya, dengan tujuan agar masing-masing dari negara tersebut mendapatkan manfaat sebesar besarnya. Untuk membuka hubungan diplomatik, sebuah negara terlebih dahulu harus mengakui negara yang dituju sebagai negara yang berdaulat. Tentunya sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebelum membangun hubungan diplomatik, Indonesia telah mengakui negara tersebut sebagai negara yang berdaulat dan sebaliknya. Walaupun tidak dapat dipungkiri ada negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia karena Indonesia belum mengakui negara tersebut sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti negara Israel.

Sejak tahun 1948, ketika Israel resmi berdiri, Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia sangat menentang keberadaan Israel di Timur Tengah dan pernah mengeluarkan kebijakan anti terhadap Israel. Penentangan Soekarno terhadap eksistensi negara Israel, bukan karena beliau beragama Islam, akan tetapi lebih ditekankan kepada faktor penjajahan Israel terhadap masyarakat Palestina. Selain itu, penolakan Soekarno terhadap eksistensi Israel di Timur Tengah sebagai bentuk kedekatan Indonesia dengan negara-negara Arab seperti Mesir yang anti terhadap Israel pada saat itu.

Konsistensi Soekarno yang anti terhadap Israel terlihat pada Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Pada saat itu bersama dengan Pakistan, Indonesia menolak partisipasi Israel yang ingin bergabung di dalam KAA.¹ Bahkan pada perhelatan *Asian Games* di Jakarta pada tahun 1964, Soekarno juga menolak keberadaan delegasi Israel yang ingin berpartisipasi pada perhelatan tersebut.²

¹ M. F. Mukthi. (nd). Sukarno dan Palestina. Dipetik November 4, 2015, dari www.historia.id : <http://historia.id/modern/sukarno-dan-palestina>

² Dina Y. Sulaeman. (2014, Juli 11). *Palestina Adalah Kita*. Dipetik Juni 30, 2014, dari dinasulaeman.wordpress.com: <https://dinasulaeman.wordpress.com/2014/07/11/palestina-adalah-kita/>

Pada masa pemerintahan Suharto, kebijakan luar negeri Indonesia terlihat lebih moderat dan pragmatis terhadap Israel. Pemerintahan Suharto terlihat sama seperti Soekarno yang mendukung negara-negara Arab yang anti terhadap Israel. Selain itu, pemerintahan Suharto juga sering mengkritik Israel di dalam forum Internasional. Faktanya ketika Raja Arab Saudi, Raja Faisal berkunjung ke Jakarta pada tahun 1970, Suharto menegaskan dukungannya kepada perlawanan negara Arab terhadap Israel.³ Selain itu, pada tahun 1982, pemerintahan Suharto juga sempat mengecam agresi militer Israel ke Libanon dan Dataran Tinggi Golan.⁴

Walaupun demikian, pada masa Suharto, Indonesia sempat melakukan hubungan dagang dengan Israel melalui Amerika Serikat pada tahun 1979. Pada saat itu Indonesia membeli dua puluh delapan pesawat *Skyhawk* dan sebelas helikopter Israel.⁵ Bahkan pada tahun 1995, Suharto sempat bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin di New York yang dilakukan secara tertutup. Keduanya sepakat atas normalisasi hubungan kedua negara kepada tahap hubungan dagang sebelum membangun hubungan diplomatik.⁶ Sehingga dapat dikatakan pada masa Suharto, Indonesia tidak pernah mengakui kedaulatan Israel akan tetapi adanya beberapa hubungan luar negeri secara informal yang dilakukan oleh kedua negara.

Pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur, resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4 menggantikan B.J. Habibie. Bertepatan empat hari setelah dilantik sebagai Presiden RI, Gus Dur menghadiri seminar *Indonesia Next* di Denpasar, Bali. Beliau pada saat itu menyatakan gagasannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel sebelum membuka hubungan diplomatik.⁷ Gagasan ini dibenarkan oleh menteri luar negeri Republik Indonesia pada saat itu, Alwi Shihab. Wacana ini banyak menimbulkan penolakan dan kecaman dari organisasi masyarakat Islam dan juga dari beberapa partai politik Islam. Sehingga Alwi Shihab selaku Menteri Luar Negeri dimintai keterangannya oleh Komisi I DPR RI. Pada

³ Arbi Sumandoyo. (2015, September 21). Jejak Mesra Hubungan Jakarta-Tel Aviv. Dipetik November 4, 2015, dari www.merdeka.com : <http://www.merdeka.com/khas/jejak-mesra-hubungan-jakarta-tel-aviv-perdagangan-indonesia-israel.html>

⁴ Colin Rubenstein. (2005, Maret 1). Indonesia and Israel: A Relationship In Waiting. Dipetik November 4, 2015, dari Jerusalem Center for Public Affairs, www.jcpa.org : <http://jcpa.org/article/indonesia-and-israel-a-relationship-in-waiting/>

⁵ Op cit, Arbi Sumandoyo.

⁶ Op cit, Colin Rubenstein.

⁷ Sidik Jatmika. (2001). Gerakan Zionis Berwajah Melayu. Hal 163. Yogyakarta:Wihdah Press.

saat itu Komisi I DPR meminta agar pemerintah meninjau kembali gagasan atau wacana tersebut.⁸

Bahkan untuk merealisasikan wacana ini Gus Dur pernah bertemu dengan salah satu tokoh Yahudi Internasional yang merupakan seorang pialang saham dunia, George Soros di New York, Amerika Serikat. Saat itu keduanya kebetulan sedang menghadiri KTT Milenium PBB. Pada kesempatan pertemuan Gus Dur dengan George Soros, Gus Dur menyatakan Indonesia siap menjalin hubungan dagang secara resmi dengan Israel. Selain itu, Gus Dur juga menyatakan secara resmi bahwa sebelumnya beliau telah menerima delegasi dagang Israel untuk merealisasikan hubungan dagang lebih jauh dengan Kadin Indonesia.⁹

Isu tentang wacana Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik, tidak hanya berkejang di dalam negeri, akan tetapi isu ini sampai kepada Palestina. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Ribbhi Awad menyampaikan isu ini kepada parlemen Palestina pada tahun 2000 melalui pidatonya pada parlemen tersebut. Gus Dur yang mengetahui tindakan dari Ribbhi Awad melalui Menteri Luar Negerinya, Alwi Shihab meminta Palestina untuk mengganti Duta Besar Ribbhi Awad dengan Duta Besar yang lain.¹⁰

Mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu beranggapan bahwa selama Israel tidak melepaskan *Al-Quds* (Yerusalem), maka Indonesia tidak harus membuka hubungan luar negeri dengan Israel. Selain itu, wacana Gus Dur untuk membuka hubungan resmi dengan Israel juga mendapatkan reaksi keras dari beberapa partai politik seperti Partai Keadilan. Partai ini menekankan perhatiannya atas perjuangan rakyat Palestina dan anti terhadap Israel.¹¹ Sehingga adanya wacana dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk membuka hubungan dagang maupun hubungan diplomatik dengan Israel pada saat itu menjadi sebuah isu yang sangat kontroversial di Indonesia. Sehingga wacana ini tidak dapat berlanjut ke tahapan realisasi kebijakan luar negeri.

⁸ Suhartono. (2001). Hubungan Indonesia-Timur Tengah Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam S. J. DPR-RI, *Analisa Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*. Hal 166. Jakarta: SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI.

⁹ Ibid. Hal 184-185

¹⁰ Ali Masykur Musa (2010). *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Hal 25. Jakarta: Penerbit Erlangga

¹¹ Ibid. Hal 187

Dari perjalanan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, belum ada pemimpin negara yang menunjukkan keinginannya dan menyatakan secara terbuka untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel kecuali Gus Dur. Faktanya pemerintahan Soekarno sangat anti terhadap Israel. Sedangkan pemerintahan Suharto sedikit terbuka terhadap Israel, tetapi Suharto tidak pernah menyatakan secara terbuka untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga penelitian terhadap pemikiran Gus Dur yang menginginkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dapat menjadi sebuah isu yang pantas untuk diteliti lebih jauh.

B. Tujuan Riset

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan dari pembukaan hubungan yang baik antara Indonesia - Israel.
2. Untuk mengetahui sistem nilai, kepercayaan dan citra yang dianut oleh presiden Abdurrahman Wahid.
3. Sebagai acuan pemerintah Indonesia dalam menentukan dan menjalankan kebijakan luar negeri di dunia internasional, khususnya terhadap Israel.

C. Kontribusi Riset

Adapun kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai pendalaman dan memperkaya kajian mengenai pembentukan wacana seorang individu, khususnya seorang pemimpin negara dan para aktor pengambil keputusan lainnya.
2. Hasil penelitian ini akan berguna bagi para peneliti, mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik untuk mengkaji tentang kebijakan luar negeri dan pembentukan wacana pemimpin negara.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang merasa diuntungkan dengan adanya penelitian tentang wacana pembukaan hubungan Indonesia - Israel.

4. Dapat dijadikan bahan atau pedoman bagi pemerintah Indonesia di dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya, khususnya dalam hal pembangunan hubungan luar negeri dengan Israel di kemudian hari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : Mengapa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menginginkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel?

E. Studi Pustaka

1. Suhartono

Studi tentang kebijakan luar negeri presiden Abdurrahman Wahid khususnya terhadap wacana pembukaan hubungan diplomatik atau hubungan secara resmi antara Indonesia dan Israel telah dilakukan oleh Suhartono di dalam buku yang berjudul *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Abdurrahman Wahid : 1999-2000*. Menurut Suhartono, kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Soekarno hingga kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid sama sekali tidak mengedepankan Islam di dalam mengambil keputusan kebijakan luar negerinya. Faktanya mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh presiden Abdurrahman Wahid selama memerintah termasuk adanya wacana pembukaan hubungan dagang dengan Israel hanyalah pandangan pragmatis dari presiden Abdurrahman Wahid, bukan berasal dari aspirasi masyarakat atau dengan kata lain Gus Dur telah melupakan dinamika politik di dalam negeri. Hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan penolakan dari organisasi masyarakat dan partai Islam. Padahal keberhasilan Gus Dur menjadi presiden Republik Indonesia karena dukungan dari partai dan ormas Islam tersebut.¹²

Menurut Suhartono, keberanian Gus Dur untuk mengeluarkan gagasan atau wacana pembukaan hubungan secara resmi Indonesia - Israel, karena Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI melalui proses yang demokratis yang menurutnya memiliki legitimasi yang kuat di dalam pemerintahan dan masyarakat. Pada masa presiden Suharto, beliau juga terlihat memiliki keinginan yang sama pada masa pemerintahannya untuk membangun hubungan luar negeri dengan Israel. Karena Suharto tidak memiliki legitimasi yang kuat

¹² Op cit, Suhartono. (2001). Hubungan Indonesia-Timur Tengah Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam S. J. DPR-RI, *Analisa Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*

terhadap masyarakat Islam, Suharto tidak pernah menyatakan secara terbuka untuk membangun hubungan tersebut. Walaupun Suharto pernah melakukan pertemuan secara tidak resmi dengan pemerintah Israel pada tanggal 15 Oktober 1993 di Cendana dan pada tanggal 22 Oktober 1995 di New York. Di mana Pertemuan-pertemuan ini hanyalah pertemuan yang memiliki kepentingan secara individu bukan kepentingan negara.¹³

Suhartono juga menyimpulkan bahwa keluarnya wacana untuk membuka hubungan secara resmi antara Indonesia - Israel pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid memiliki dua faktor keinginan pragmatis Abdurrahman Wahid. Pertama, secara eksplisit Gus Dur menginginkan Indonesia memiliki hubungan baik dengan Israel karena menurut beliau, dengan adanya hubungan yang baik dengan Israel, Indonesia mampu meningkatkan perekonomiannya. Kedua, Gus Dur menginginkan Indonesia mampu menjadi juru perdamaian di Timur Tengah dengan tahap awal membangun hubungan dagang dengan Israel.¹⁴

2. Rizal Sukma

Rizal Sukma di dalam bukunya yang berjudul *Islam In Indonesia Foreign Policy* (Islam di Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia) berpendapat, bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid tidak menunjukkan perubahan objektif yang berarti dari beberapa kebijakan presiden-presiden sebelumnya. Sukma memaparkan di dalam bukunya, setidaknya ada tiga objektif yang dimaksud. Pertama, objek utama pemerintahan Wahid lebih menekankan pentingnya penegakan integritas wilayah Indonesia. Kedua, presiden Gus Dur berkeinginan untuk mengembalikan martabat negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan juga mendapatkan posisi sebagai negara yang terhormat di muka komunitas internasional. Ketiga, setiap kebijakan luar negeri dan seluruh upaya diplomasi harus berorientasikan prioritas pemerintah yaitu memperbaiki kepercayaan dunia internasional dan percepatan perbaikan ekonomi.¹⁵

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Rizal Sukma. (2003). *Islam In Indonesian Foreign Policy*. London: Routledge Curzon.

Walaupun objektif kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Gus Dur kurang lebih sama dengan pendahulunya, akan tetapi dalam hal manifestasinya menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Di dalam menentukan kebijakan luar negerinya, Gus Dur memiliki dua aspek kunci yaitu “*the policy of equidistance*” (kebijakan berjarak sama) dan “*balancing act*” (pengimbangan). Kedua aspek kunci inilah yang membuat manifestasi dari kebijakan luar negeri Gus Dur berbeda dengan pendahulunya.¹⁶ Salah satu bentuk manifestasi dari aspek kunci ini adalah adanya gagasan untuk membangun hubungan resmi dengan Israel yang belum pernah digagas oleh para presiden sebelumnya.

Selain itu Sukma juga memiliki pendapat yang sama dengan Suhartono, bahwa formulasi “*policy of equidistance*” dan “*balancing act*” di dalam kebijakan luar negeri Gus Dur tidak secara resmi meletakkan faktor-faktor Islam atau dengan kata lain unsur-unsur Islam telah absen selama pemerintahan Gus Dur. Hubungan luar negeri Indonesia dengan Timur Tengah bukan karena faktor kedekatan sebagai negara bermayoritas Islam, akan tetapi lebih mengedepankan atau berbingkaikan kepentingan ekonomi domestik Indonesia. Hal ini tentunya diperkuat dengan adanya wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Padahal mayoritas negara Islam Timur Tengah sangat menentang keberadaan Israel di Timur Tengah. Menurut Sukma, kepemimpinan Gus Dur lebih terlihat meletakkan Islam dalam bentuk kebijakan luar negerinya bukan secara substansial, atau dengan kata lain Islam itu masuk ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia sebagai kepentingan politik domestik bukan demi kepentingan *ummah* secara umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid kurang lebih sama dengan masa kepemimpinan Suharto yang lebih memiliki kecenderungan sekuler.

3. Alwi Shihab

Di dalam buku *Islam in Indonesia Foreign Policy* ini, Sukma juga mengutip beberapa argumen Alwi Shihab sebagai menteri luar negeri pada saat itu tentang gagasan atau wacana pembukaan hubungan Indonesia - Israel. Pertama, Alwi Shihab berpendapat bahwa hubungan Indonesia secara langsung dengan Israel mampu memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran penting untuk mencari solusi perdamaian antara Palestina-Israel. Kedua, Shihab juga berpendapat bahwa

¹⁶ Ibid.

hubungan yang baik dengan Israel mampu menarik lobi Yahudi untuk berinvestasi di Indonesia, mengingat mayoritas penguasa ekonomi dunia berasal dari keturunan Yahudi Internasional. Ketiga, perencanaan hubungan yang baik dengan Israel merupakan argumen agama. Pada masa nabi Muhammad SAW, Muhammad juga pernah menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan kaum Yahudi walaupun pada akhirnya kaum Yahudi melontarkan konspirasi menentang Muhammad.

Argumen Shihab yang keempat adalah hubungan yang baik dengan Israel mampu mencegah pengadilan Internasional terhadap beberapa Jenderal TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terkena kasus hak asasi manusia di Timor Leste. Pada saat itu UNHCHR (United Nations High Commission for Human Rights) yang dipimpin oleh Mary Robinson berupaya sangat keras untuk membawa beberapa Jenderal TNI ke pengadilan internasional atas kejahatan perang yang dilakukan di Timor Leste. Argumen Shihab yang terakhir adalah hubungan secara resmi dengan Israel mampu mencegah Indonesia dari krisis ekonomi. Shihab berpendapat bahwa salah satu tokoh ekonomi Yahudi internasional, George Soros mampu menghasut atau menciptakan krisis di dalam ekonomi Indonesia. Sehingga dengan adanya hubungan diplomatik yang baik dengan Israel, pemerintah bisa melobi George Soros untuk tidak mengacau ekonomi Indonesia.¹⁷

4. Sidik Jatmika

Sedangkan di dalam buku yang berjudul “Gerakan Zionis Berwajah Melayu”, Sidik Jatmika mengutarakan pendapatnya tentang dampak negatif apabila Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Setidaknya ada lima dampak negatif tersebut. Pertama, apabila Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka Indonesia telah melanggar UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 karena di dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang anti penjajahan. Menurut Jatmika, fakta di lapangan Israel telah menjajah Palestina.¹⁸

Kedua, menurut Jatmika, hubungan diplomatik Indonesia - Israel dapat merusak citra Indonesia di mata dunia Islam dan masyarakat dunia yang cinta damai pada umumnya. Ketiga, hubungan diplomatik Indonesia - Israel dapat melemahkan *bargaining position* (posisi tawar) gerakan perjuangan bangsa Palestina terhadap Israel.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sidik Jatmika. (2001). *Gerakan Zionis Berwajah Melayu*. Hal 180-181. Yogyakarta: Wihdah Press

Keempat, dalam bidang bisnis atau perdagangan yang telah terjadi antara Indonesia dengan Israel, Indonesia mengalami defisit. Hal ini terjadi karena perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan Israel tidak sebanding. Dampak negatif yang terakhir menurut Jatmika adalah hubungan diplomatik Indonesia - Israel dapat mengganggu stabilitas politik domestik Indonesia yang sebagian besar penduduk Indonesia menolak hubungan antara Indonesia - Israel.¹⁹

5. Perbandingan Studi Pustaka

Dari beberapa hasil studi yang penulis temukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Rizal Sukma dan Suhartono menitik beratkan wacana pembukaan hubungan diplomatik atau hubungan secara resmi Indonesia - Israel oleh Gus Dur atas dasar kepentingan nasional Indonesia. Walaupun menurut Suhartono, Gus Dur telah melupakan dinamika politik dalam negeri. Selain itu keduanya juga sepakat bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh Gus Dur bukan berasaskan Islam. Asas-asas Islam hanya ada dalam rangka memperkuat stabilitas politik domestik. Sedangkan secara substansial kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Dur telah mengabsenkan asas-asas Islam yang dapat dilihat dengan keluarnya wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia - Israel.

Dari sudut pandang yang lain, mantan menteri luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur yaitu Alwi Shihab juga sepakat dengan pandangan Suhartono dan Sukma bahwa kebijakan luar negeri Indonesia bergantung kepada kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi Shihab memiliki pandangan yang berbeda khususnya terhadap wacana pembukaan hubungan dagang Indonesia-Israel adalah bentuk ketiadaan dari asas-asas Islam. Salah satu argumen Menlu Shihab yang dikutip oleh Sukma di dalam bukunya yang berjudul *Islam in Indonesia Foreign Policy*, menyatakan bahwa wacana ini tidak bertentangan dengan asas-asas Islam. Mengingat nabi Muhammad SAW pernah melakukan hubungan dagang dengan umat Yahudi. Walaupun pada akhirnya hal ini menjadi kontroversial karena umat Yahudi pada saat itu melakukan tindakan konspirasi menentang nabi Muhammad SAW.

Sedangkan dari tulisan Jatmika berbeda dari keseluruhan tulisan yang ada. Jatmika di dalam bukunya *Gerakan Zionis Berwajah Melayu* lebih menekankan bahwa

¹⁹ Ibid.

hubungan luar negeri antara Indonesia - Israel lebih baik untuk tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya, mengingat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari hubungan ini lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya.

Di dalam penelitian ini, penulis memiliki posisi yang berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menitik beratkan analisa wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia-Israel sebagai bentuk kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional ini seperti unsur ekonomi, kedaulatan, integritas dan martabat Indonesia. Penulis akan mencoba menganalisa wacana ini melalui sistem nilai, kepercayaan, dan citra pribadi Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan level analisis individual. Selain itu di dalam penelitian ini, penulis juga mencoba memperkuat argumen yang dipaparkan oleh Alwi Shihab, bahwa wacana ini sebagai faktor ideologi dan kepercayaan Islam yang dianut oleh Gus Dur. Sehingga wacana ini sesungguhnya berlandaskan asas-asas Islam. Adapun di dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas tentang manfaat positif dan negatif seperti apa yang dipaparkan oleh Alwi Shihab dan Sidik Jatmika.

Sehingga rangkuman dari studi pustaka ini dapat digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 1.1

Rangkuman Studi Pustaka²⁰

Analisa	Penelitian				
	Suhartono	Rizal Sukma	Alwi Shihab	Sidik Jatmika	Peneliti
Wacana hubungan diplomatik Indonesia-Israel berdasarkan pemikiran Gus Dur atas kepentingan nasional Indonesia.	✓	✓	✓	x	x
Pernyataan ketiadaan asas Islam di dalam wacana pembukaan hubungan dagang Indonesia-Israel	✓	✓	x	✓	x
Wacana hubungan Indonesia-Israel berdasarkan sistem nilai yang dianut Abdurrahman Wahid sebagai presiden	x	x	x	x	✓
Pemaparan dampak positif/negatif dari pembukaan hubungan luar negeri Indonesia-Israel	x	x	✓	✓	x

²⁰ Diolah dari berbagai sumber.

F. Kerangka Teoritik

Pada penelitian ini, penulis menggunakan salah satu variabel dari beberapa variabel pembentukan kebijakan luar negeri yang diutarakan oleh James N. Rosenau. Variabel tersebut adalah variabel Ideosinkretik atau individual. Variabel ini kemudian penulis gunakan sebagai acuan dasar penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep mediasi untuk menjelaskan tujuan dari Gus Dur yang menginginkan Indonesia memiliki hubungan dengan Israel.

1. Variabel Ideosinkretik

Menurut Carlton Clymer Rodee, kebijakan luar negeri adalah pola perilaku negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya ketika melakukan hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain kebijakan luar negeri adalah proses akumulatif dari tujuan, prioritas negara, keputusan pemerintah, dan upaya pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk bersaing dengan negara lain di dunia internasional.²¹

Di dalam penentuan kebijakan luar negeri setidaknya ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Menurut James N. Rosenau, faktor-faktor tersebut adalah ideosinkretik, peranan, birokratis, nasional, dan sistemik. Variabel ideosinkretik atau individual adalah sebuah variabel yang berhubungan dengan pandangan, persepsi, dan karakteristik pribadi seorang pembuat keputusan seperti pemimpin negara. Memang menurut Theodore A. Coulumbis bahwa karakter psikologis dan kegemaran seorang pembuat keputusan terhadap sebuah ideologi tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh terhadap sebuah kebijakan politik. Walaupun karakteristik dari seseorang pengambil keputusan tersebut sangat sulit untuk diukur. Selain itu menurut Coulumbis, keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari variabel ideosinkretik terlihat memiliki kecenderungan kepada hasil yang bersifat pragmatis. Coulumbis juga menambahkan bahwa analisa variabel ideosinkretik akan lebih mudah dianalisa pada keputusan-keputusan di negara totaliter dan otoriter dibandingkan di negara demokratis. Hal ini terjadi karena pemimpin di negara demokratis memiliki kecenderungan untuk tunduk

²¹ Carlton Clymer Rodee. (2002). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali.

kepada beberapa faktor yang ada di negara demokratis seperti kebebasan pers, parlemen, opini publik, kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan lain-lain.²²

Variabel ideosinkretik menurut Mohtar Mas'ood, juga disebut sebagai teori persepsi atau citra. Citra yang dimiliki setiap individu berbeda-beda karena citra itu bersifat dinamik yang dapat berubah-ubah kapan saja tergantung bagaimana dan apa yang diketahui seseorang tentang sesuatu yang mendorong mereka untuk mengeluarkan tindakan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala tindakan seorang individu tergantung bagaimana seseorang memandang objek tersebut.²³

Bruce Russett dan Harvey Starr di dalam buku Mohtar Mas'ood yang berjudul *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi* menjelaskan bagaimana hubungan citra dan perilaku internasional. Sebelum adanya sebuah situasi atau masalah untuk ditanggapi, para pembuat keputusan seperti pemimpin negara atau setingkat menteri, mengalami tiga hal yang terjadi. Pertama, akan ada *trigger event* atau sering disebut sebagai rangsangan dari lingkungan. Kedua, akan ada upaya untuk memersepsi rangsangan tersebut. Ketiga, akan ada penafsiran terhadap persepsi yang diterima oleh para pembuat keputusan. Dari sinilah bagaimana citra dan perilaku internasional dapat terjadi di mana penafsiran dan persepsi tersebut berkaitan atau bergantung kepada citra seorang pengambil keputusan.²⁴

Mengingat penelitian ini hanya sebatas penelitian terhadap wacana atau gagasan yang dikeluarkan oleh Gus Dur belum sampai kepada tahapan sebuah kebijakan luar negeri, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini kepada analisa variabel ideosinkretik yang dipaparkan oleh James N. Rosenau. Walaupun Indonesia pada saat itu berupaya untuk menjadi sebuah negara demokratis pasca rezim orde baru, gagasan Gus Dur mengenai upaya pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dapat dikatakan sebagai gagasan pragmatis Gus Dur. Faktanya gagasan tersebut telah mengabaikan beberapa faktor demokratis seperti opini publik, kelompok-kelompok organisasi masyarakat, dan parlemen yang tidak menghendaki Indonesia untuk

²² Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe (1999). Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power. Hal 129-130. Bandung: Putra A Bardin

²³ Mohtar Mas'ood. (1989). Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi. Hal 19-20. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

²⁴ Ibid.

membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga menurut penulis gagasan Gus Dur ini dapat dianalisa dengan analisa ideosinkretik.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya variabel ideosinkretik adalah sebuah variabel yang berhubungan dengan pandangan, persepsi, dan karakteristik pribadi seorang pembuat keputusan. Maka karakteristik dan pandangan seorang pembuat keputusan tersebut juga dapat disebut sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan citra dari seorang individu. Sistem-sistem ini yang kemudian mampu mempengaruhi perilaku, pandangan dan tindakan seorang individu terhadap sebuah objek tertentu. Sistem nilai, kepercayaan, dan citra tidak ada dengan sendirinya, akan tetapi sistem-sistem ini terbentuk dari kepercayaan, ideologi, budaya, dan pengalaman-pengalaman yang pernah dihadapi oleh seorang individu.

Dengan analisa variabel ideosinkretik ini tentunya penulis akan dapat menemukan mengapa presiden Abdurrahman atau Gus Dur mengeluarkan wacana bahwa beliau menginginkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Padahal wacana tersebut bertentangan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas tidak menginginkan adanya hubungan Indonesia dengan Israel. Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap bangsa Yahudi Israel telah merampas hak-hak masyarakat Palestina atas tanah dan wilayah kekuasaannya.

Pengkajian tentang perjalanan hidup dan pengalaman-pengalaman Abdurrahman Wahid sangat menentukan untuk mengetahui bagaimana wacana tersebut keluar dari Gus Dur. Kemudian dari pengalaman-pengalaman Gus Dur dapat ditemukan sistem nilai, ideologi dan citra yang dianut oleh Gus Dur yang mengeluarkan wacana kontroversial tentang pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia - Israel.

2. Konsep Mediasi

Mediasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau permasalahan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti penengahan. Di dalam sebuah mediasi

dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang berusaha menengahi permasalahan dalam persengketaan.²⁵

Christopher W. Moore menyatakan pihak ketiga di dalam mediasi memiliki posisi sebagai pihak yang berupaya mengintervensi sebuah sengketa yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan bukan berasal dari pihak yang bersengketa. Hal wajib yang harus dimiliki oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa adalah netralitasnya. Selain itu, di dalam mediasi pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan, pihak ketiga hanya memiliki kewajiban untuk mendorong para pihak secara sukarela mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.²⁶ Bambang Sutiyoso, dalam buku *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, menyatakan sebagai berikut:²⁷

“Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.”

Dalam kasus keluarnya gagasan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sesungguhnya Gus Dur ingin memiliki posisi yang netral di dalam sengketa Palestina - Israel agar mampu menjadi mediator di antara kedua belah pihak. Keinginan Gus Dur ini diperkuat dengan adanya *the policy of equidistance* dan *balancing act* di dalam kebijakan luar negeri Gus Dur yang diungkapkan oleh Rizal Sukma. Di mana Gus Dur menginginkan jarak yang sama dan upaya penyeimbangan di dalam kebijakan luar negerinya.

G. Hipotesa

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hipotesa bahwa keinginan Presiden Abdurrahman Wahid untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel karena:

²⁵ Bambang Sutiyoso. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hal 56-57. Yogyakarta: GAMA MEDIA.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid. Hal 58.

1. Adanya pengaruh dari sistem nilai kepercayaan, ideologi dan citra atau persepsi yang dianut oleh Abdurrahman Wahid.
2. Abdurrahman Wahid memiliki keinginan untuk menjadi juru damai di Timur Tengah terutama terhadap konflik Palestina – Israel. Hal ini dapat tercapai apabila adanya dimensi negosiasi baru di dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel dan Palestina. Dimensi baru tersebut adalah jalur penyelesaian konflik mediasi.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan eksplanatif atau dikenal dengan *mix method*. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta latar belakang dan pengalaman-pengalaman Gus Dur selama hidupnya sebelum dan selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 1999-2001. Dengan mengetahui latar belakang Gus Dur tersebut, penulis akan menemukan sistem nilai, kepercayaan dan citra Gus Dur. Kemudian dengan metode eksplanatif penulis menjelaskan mengapa Gus Dur menginginkan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia - Israel yang belum pernah digagas oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai wacana pembukaan hubungan luar negeri Indonesia - Israel pada masa pemerintahan Gus Dur, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 1999 sampai 2001, beserta pada waktu tertentu yang menurut penulis memiliki peran penting di dalam penelitian ini. Alasan penulis untuk memilih waktu tersebut karena wacana atau gagasan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia -Israel dinyatakan secara terbuka pada masa pemerintahan Gus Dur.

Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Mengingat penelitian ini berbasis *library research* maka Yogyakarta sudah cukup memadai sebagai tempat penelitian. Selain itu di Yogyakarta juga terdapat komunitas Gusdurian, di mana komunitas ini telah lama mengkaji tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur. Tentunya melalui

komunitas ini penulis dapat mengkaji lebih dalam citra dan sistem nilai kepercayaan Gus Dur.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Telaah pustaka adalah metode pengumpulan data melalui literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Literatur-literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet terpercaya ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatif, di mana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validasi data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang di antaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Library Research

Seperti yang penulis sebutkan di atas pengumpulan data dari buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet menjadi sangat penting dan paling utama. Mengingat peristiwa keluarnya wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia - Israel pada masa presiden Abdurrahman Wahid telah berlangsung lama sehingga salah satu jalan yang dapat ditempuh di dalam penelitian ini adalah *library research*

b. Short Course

Selain menggunakan metode *library research*, penulis telah mengikuti program *short course* tentang pemikiran Gus Dur. Program ini diselenggarakan oleh komunitas Gusdurian bekerja sama dengan komunitas santri Gus Dur. Di mana program tersebut sering dikenal dengan sebutan “Kelas Pemikiran Gus Dur”. Program ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 22 November 2015. Selama *short course* tersebut para peserta diberi materi dan pemahaman tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur yang disampaikan oleh beberapa pemateri dari kalangan peneliti, aktivis dan tokoh-tokoh dari kalangan NU yang dirasa memiliki kedekatan dengan sosok Gus Dur. Sehingga melalui program ini penulis dapat mengkaji citra dan sistem nilai kepercayaan dari Gus Dur.

c. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa data kualitatif. Data-data yang dikumpulkan akan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya agar dapat ditarik sebuah kesimpulan baru.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II, Dinamika Perjalanan Sosial dan Politik Abdurrahman Wahid. Bab ini akan menggambarkan latar belakang Abdurrahman Wahid mulai dari keluarga hingga pendidikan Gus Dur beserta perkembangan karier beliau. Selain itu bab ini juga akan mendeskripsikan kiprah Gus Dur di dunia perpolitikan Indonesia.

BAB III, Dinamika Konflik Arab - Israel dan Hubungan Luar Negeri Indonesia Israel. Bab ini akan mendeskripsikan siapa sebenarnya bangsa Yahudi dan gambaran sejarah berdirinya negara Israel. Selain itu di dalam bab ini juga akan membahas tentang konflik Arab - Israel dan juga bagaimana hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Israel sebelum Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

BAB IV, Analisa Wacana Abdurrahman Wahid Terhadap Isu Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia - Israel. Bab ini akan menjelaskan mengapa Gus Dur menginginkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di dalam bab ini penulis akan membahas terlebih dahulu citra dan sistem nilai kepercayaan Gus Dur kemudian mengaitkan sistem nilai tersebut kepada gagasan Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

BAB V, Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.